

EVALUASI PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU MENGGUNAKAN PENDEKATAN METODE PEGI

Fitri Wahyuni¹, Angraini²

Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN SUSKA Riau

Email : ¹fitri.wahyuni94@gmail.com, ²anraini@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (e-Gov) merupakan langkah awal implementasi e-Gov di Indonesia. Melalui pengembangan e-Gov, penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah telah dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mengukur penerapan e-Gov, maka diperlukan sebuah assesment untuk melihat sejauhmana kesiapan pemerintah. Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGI) merupakan ukuran implementasi e-Gov di Indonesia. Penelitian ini melakukan pemingkatan e-Gov di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau. Data penelitian diperoleh dengan pendekatan kualitatif dan analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Gov di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam kategori baik. Berdasarkan hasil penelitian dari 5 aspek dimensi yang digunakan pada aspek dimensi perencanaan berkategori “Kurang” sedangkan 4 aspek dimensi lainnya yaitu aspek dimensi kelembagaan, kebijakan, infrastruktur dan aplikasi berkategori “Baik”. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau diharapkan dapat melakukan perbaikan dan pengembangan untuk implementasi e-Gov yang lebih baik.

Kata kunci : *e-government* , dinas komunikasi dan informatika provinsi riau, PeGI.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan e-government untuk sarana penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan layanan publik artinya menyelenggarakan roda pemerintahan dengan bantuan (memanfaatkan) teknologi informasi dan komunikasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau merupakan sebuah institusi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Penerapan e-Government telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau yang dapat dilihat dari berbagai aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan data yang ada di dinas tersebut seperti aplikasi SDDKD (Sistem Database Dukungan Kebijakan Daerah) yang telah diterapkan pada tahun 2009, aplikasi ini digunakan untuk memberikan informasi kepada daerah terkait hasil pelaksanaan pembangunan dari berbagai aspek pembangunan dan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan dan untuk mendukung pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Daerah (tingkat I/II) yang hasil pengelolaan data tersebut dapat digunakan untuk pemerintah (G2G), masyarakat (G2C) dan bisnis (G2B) dan aplikasi yang juga diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau

yaitu e-Office yang diterapkan pada tahun 2012 , aplikasi ini digunakan untuk administrasi dan manajemen umum yang hasil pengelolaan datanya digunakan untuk kepentingan organisasi.

Berdasarkan permasalahan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau , penerapan e-government di instansi tersebut terkendala di belum adanya master plan IT , hal ini mengakibatkan tidak adanya acuan implementasi penerapan e-government yang dilaksanakan, selain itu infrastruktur yang digunakan belum cukup memadai seperti belum adanya disaster recovery planning (Prosedur penanggulangan insiden) hal ini mengakibatkan terancamnya kehilangan data jika terjadinya insiden pada aplikasi yang digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, pengevaluasian aplikasi e-government dan Pengukuran untuk melihat sampai sejauh mana tingkat keberhasilan penerapan e-government di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau belum pernah dilakukan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka ditentukan permasalahan sebagai bahan penelitian untuk laporan tugas akhir. Adapun judul yang dipilih yaitu “Evaluasi Penerapan e-Government

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Menggunakan Pendekatan Metode PeGI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diambil sebuah rumusan masalah, “Bagaimana mengevaluasi Penerapan e-Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Menggunakan Pendekatan Metode PeGI”.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah, maka peneliti membatasi permasalahan pada

1. Penerapan aplikasi e-Government yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau yaitu aplikasi SDDKD dan E-Office .
2. Pendekatan metode PeGI dengan 5 dimensi acuan yaitu kelembagaan , kebijakan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan.
3. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur, wawancara, dan kuisioner.
4. Responden penelitian ini ditentukan menggunakan RACI Chart yaitu kepala bidang pemberdayaan sistem informasi , kepala bidang aplikasi dan informatika, kepala subbagian perencanaan program, kepala seksi analisis data , kepala seksi penyajian data , kepala seksi pengumpulan data, kepala seksi pengembangan aplikasi dan keamanan informatika, kepala seksi piranti teknologi informatika, kepala seksi jaringan komunikasi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk menganalisa dan mengevaluasi penerapan e-government yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau terkhususnya pada aplikasi e-Government yang diterapkan.
2. Untuk mengukur tingkat penerapan e-government yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau berdasarkan metode PeGI (pemeringkatan e-government Indonesia).
3. Untuk merekomendasikan hal-hal yang dianggap perlu untuk dikembangkan untuk menunjang penerapan e-government yang lebih baik.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat manfaat, yaitu :

1. Hasil dari penilaian penerapan e-government Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Riau ini dapat memberikan informasi apakah penerapan e-government terkhususnya yang dilaksanakan pada aplikasi e-government, sudah baik atau tidak dan untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan atas pengembangan dan pemanfaatan e-government di masa yang akan datang.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK dan dijadikan Sebagai kerangka acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam mengevaluasi apa saja yang telah dan perlu diperbaiki dalam penerapan aplikasi e-Government

II. LANDASAN TEORI

A. e-Government

Salah satu definisi yang dibuat oleh Bank Dunia (The World Bank Group, 2001) : e-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government.

B. SDDKD (Sistem Database Dukungan Kebijakan Daerah)

SDDKD (Sistem Database Dukungan Kebijakan Daerah) adalah Sistem informasi berbasis web yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada daerah terkait hasil pelaksanaan pembangunan dari berbagai aspek pembangunan dan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan dan untuk mendukung pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Daerah (tingkat I/II).

C. E-Office

Electronic Office (e-office) adalah suatu sistem yang berhubungan dengan administrasi, secara maya memusatkan komponen-komponen sebuah organisasi dimana data, informasi, dan komunikasi dibuat melalui media telekomunikasi.

D. Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

E. Metode PeGI

PeGI merupakan metodologi untuk assessment kesiapan pemerintah dalam penerapan e-government yang hasil akhirnya berupa nilai yang dapat digunakan untuk menyusun peringkat.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tahap Perencanaan

Langkah pertama dalam meneliti ini adalah memilih dan merumuskan masalah serta dapat dilihat dari sumber-sumber yang ada. Adapun tahap perencanaan ini adalah sebagai berikut :

1. Mulai
2. Perumusan Masalah
3. Penentuan Tujuan
4. Studi Pustaka

B. Tahap Pengumpulan Data

Adapun tahap pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Wawancara
2. Kuisioner
3. Studi Literatur

C. Tahap Analisis dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan. Langkah berikutnya dalam kegiatan analisis dan pembahasan, yang dilakukan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut :

1. Analisa penerapan aplikasi e-government
2. Dimensi dan indikator Metode PeGI
3. Populasi dan Sample
4. Pengolahan data kuisioner dengan metode analisis deskriptif

Tabel 1. Hasil Keseluruhan Per Dimensi

| DIMENSI | SKOR | KATEGORI |
|------------------|-------------|-------------|
| KELEMBAGAAN | 2.91 | BAIK |
| KEBIJAKAN | 3.09 | BAIK |
| INFRASTRUKTUR | 2.88 | BAIK |
| APLIKASI | 2.55 | BAIK |
| PERENCANAAN | 2.26 | KURANG |
| TOTAL | 13.7 | |
| RATA-RATA | 2.74 | BAIK |

D. Tahap Dokumentasi

Tahap dokumentasi merupakan tahapan dalam membuat laporan penelitian dari awal hingga akhir. Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan konsultasi dengan pembimbing penelitian
2. Melengkapi laporan penelitian dari awal hingga akhir
3. Selesai

E. Dimensi Kelembagaan

Indikator negatifnya adalah :

- a) Kurangnya ketersediaan SDM dan jumlah dan tingkat kompetensi pendataan tenaga kerja yang lengkap.

Indikator positifnya adalah :

- a) Bagan organisasi sudah beroperasi secara resmi dan berjalan efektif
- b) Sudah adanya dokumen yang menunjukkan tugas dan fungsi dari organisasi dan unit unit kerja didalamnya.
- c) Ketersediaan sistem dan prosedur kerja sudah baik dan sudah lengkap dan terdokumentasi dengan baik , baik dari sistem dan prosedur , tata cara kerja dan pengaturan pelaksanaan tugas atau kegiatan TIK.
- d) Program SDM bidang TIK sudah cukup baik namun perlu pengembangan yang lebih baik lagi.

F. Dimensi Kebijakan

Indikator positifnya adalah :

- a) Sudah baiknya dan adanya manajemen atau proses terkait kebijakan e-government
- b) Sudah di bentuknya visi dan misi yang berkaitan dengan TIK
- c) Telah dibuatnya dokumen yang memuat strategi penerapan kebijakan TIK .
- d) Telah dibuat dan diterapkan acuan-acuan untuk kebijakan TIK
- e) Keputusan dan ketetapan yang diambil oleh pejabat instansi sudah baik
- f) Adanya penentuan prioritas dalam kebijakan TIK
- g) Evaluasi internal dan independen sudah menuju baik namun harus dilakukan pengembangan dan perbaikan.

G. Dimensi Infrastruktur

Indikator negatifnya adalah :

- a) Kurangnya ketersediaan data center dan disaster recovery planning
- b) Kurangnya rencana atau prosedur penanggulangan insiden (disaster recovery planning) dan proses pemback-upan data,
- c) Kurangnya pemeliharaan khusus terkait infrastruktur , prosedur perawatan dan ketersediaan redundant sistem pada saat perawatan,
- d) Inventaris peralatan TIK dan manajemen asset masih kurang.

Indikator positifnya adalah :

- a) Ketersediaan jaringan data sudah baik.
- b) Pengamanan sistem informasi , ketersediaan kebijakan atau prosedur sudah baik.
- c) Fasilitas pendukung sudah baik dari segi keamanan fisik , ketersediaan listrik dan HVAC

H. Dimesi Aplikasi

Indikator negatifnya adalah :

- a) Kurangnya penerapan dokumentasi aplikasi yang digunakan,

Indikator Positifnya adalah :

- a) Dokumentasi atas inventaris aplikasi sudah baik.
- b) Kemampuan atas bertukar data sudah baik.

I. Dimensi Perencanaan

Indikator negatifnya adalah :

- a) Master plan IT belum terdokumentasi dengan baik karena masih dalam tahap perubahan
- b) kurang evaluasi terhadap master plan IT

Indikator positifnya adalah :

- a) sudah adanya keinginan untuk pengembangan masteplan khusus TIK
- b) sudah baiknya mekanisme baku dalam penyusunan master plan TIK
- c) keikutsertaan stakeholder dalam perencanaan TIK sudah baik

J. Rekomendasi

Tabel 2. Tabel Rekomendasi

| No | Dimensi | Indikator Negatif | Saran Perbaikan |
|----|----------------------|--|--|
| 1 | Kelembagaan | 1. Kurangnya ketersediaan SDM dan jumlah dan tingkat kompetensi pendataan tenaga kerja yang lengkap | Disarankan untuk menambah ketersediaan SDM dan jumlah dan tingkat kompetensi pendataan ketenagakerjaan yang lengkap untuk meningkatkan kualitas kerja terutama dalam pengembangan e-government |
| 2 | Kebijakan | | masih perlunya peningkatan dalam segi kualitas penentuan kebijakan dan evaluasi pengembangan e-government agar penerapan TIK dapat memberikan manfaat yang lebih baik lagi. |
| 3 | Infrastruktur | 1. Kurangnya ketersediaan data center dan disaster recovery planning 2. Kurangnya rencana atau prosedur penanggulangan insiden (disaster recovery planning) dan proses pemback-upan data 3. Kurangnya pemeliharaan khusus terkait infrastruktur , prosedur perawatan dan ketersediaan redundant sistem pada saat perawatan. 4. Inventaris peralatan TIK dan manajemen asset masih kurang. | Perlunya ketersediaan data center dan pembuatan disaster recovery planning Perlunya dibuat prosedur penanggulangan insiden dan proses pemback-upan data berkala. Perlunya pemeliharaan khusus terkait infrastruktur dan dibuatkan prosedur perawatan dan ketersediaan redundant sistem pada saat proses perawatan untuk meningkatkan fasilitas pendukung yang ada. |
| 4. | Aplikasi | 1. Kurangnya penerapan dokumentasi aplikasi yang digunakan | Perlunya pengelolaan inventaris peralatan TIK dan manajemen asset agar inventarisasi peralatan TIK lebih terkontrol dan menjaga asset yang ada. Perlu dokumentasi aplikasi yang digunakan , dan perlunya dilakukan training aplikasi yang digunakan berdasarkan manual book yang ada , agar penggunaan aplikasi lebih optimal dan digunakan sesuai dengan fungsinya. |
| 5. | Perencanaan | 1. Master plan TIK belum terdokumentasi dengan baik karena masih dalam tahap perubahan 2. kurang evaluasi terhadap master plan TIK. | Master plan TIK dibuat sebagai acuan penerapan e-government yang berjalan Perlunya evaluasi terhadap Master plan TIK. |

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari evaluasi penerapan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi penerapan e-government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau berdasarkan kerangka kerja PeGI adalah 2,74 yang berkategori “Baik” yang dalam hal ini Indikator berjumlah dan berkualitas cukup baik dan dapat dilihat membawa dampak positif pada pemanfaatan e-government masih namun diperlukan perbaikan perbaikan untuk menjaga kelangsungan implementasi e-government.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan e-government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau , pada aspek dimensi kelembagaan, kebijakan, infrastruktur dan aplikasi berkategori “Baik” namun masih perlu di lakukan pengembangan dan perbaikan untuk meminimalisir indikator negatif yang ada.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan e-government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau , pada aspek perencanaan harus ditingkatkan lagi karena berdasar penilaian aspek dimensi perencanaan bernilai 2,26667 yang berkategori “Kurang”.

B. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi, ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu :

1. Untuk mencapai kondisi level penerapan e-Government yang diharapkan , memerlukan adanya strategi yang tepat dan sesuai dengan lingkungan organisasi.
2. Penelitian ini hanya membahas satu indikator metode yaitu metode PeGI , diharapkan kedepannya dapat melakukan komparasi metode pengukuran PeGI dengan metode pengukuran metode lainnya.
3. Hasil penelitian ini disarankan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau untuk memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK dan dijadikan Sebagai kerangka acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam mengevaluasi apa saja yang telah dan perlu diperbaiki dalam penerapan aplikasi e-Government

4. Pencapaian hasil evaluasi perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali agar penerapan E-Government bisa maksimal serta memenuhi segi jumlah maupun kualitas sangat baik. Dampak pada penerapan e-government bisa terlihat sangat nyata dan agar kesiapan untuk terus dikembangkan pada masa yang akan datang sudah terlihat jelas.

REFERENSI

- 1) Ahmad Fitriansyah et.al. Metode Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) untuk audit tata kelola informasi pada PDAM Kota Denpasar. Seminar nasional sistem informasi Indonesia , Desember 2013
- 2) Aryani ,P. F. Kajian kerangka kerja pemeringkatan e-government di tingkat kabupaten/ kotamadya. BIT Vol 10 No. 1 April 2013
- 3) Diskominfo Provinsi Riau. Rancangan Akhir RENSTRA SKPD 2014-2019. Pekanbaru . 2014
- 4) Diskominfo Provinsi Riau. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Pekanbaru . 2013
- 5) Diskominfo Provinsi Riau. Data dan informasi pembangunan Provinsi Riau 2014. Pekanbaru. 2014.
- 6) Diskominfo Provinsi Riau. Kuisoner PeGI 2014. Pekanbaru. 2014
- 7) Fahmi Alusi et.al. Penyusunan strategi e-government berbasis kerangka kerja pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI) di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Jurnal sistem informasi Vol 10 No. 1 April 2014.
- 8) Indrajit,R. Eko. E-Government in action. Penerbit Andi. Yogyakarta. 2005
- 9) Kadir, Abdul. Pengenalan Sistem Informasi . Penerbit Andi. Yogyakarta. 2003.
- 10) Kominfo. Pemeringkatan E-Government Indonesia di Wilayah Provinsi Riau . Jakarta . 2010.
- 11) PeGi. Pemeringkatan e-government indonesia , www.pegilayanan.go.id diakses tanggal 5 Januari 2015.
- 12) Tamsil. Pemeringkatan e-government di kota Makassar. Jurnal Perkomnas, Vol 16 No. 3 , Desember 2013.
- 13) Umar, Husein. Evaluasi Kinerja Perusahaan. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2002.
- 14) Widoyoko, Eko Putro. teknik penyusunan instrument penelitian. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2014.